



RINGKASAN L P P D

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa kekuatan serta kesehatan lahir dan batin sehingga penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) ini dapat diselesaikan sebagai bagian dalam rangkaian pelaporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

Penyampaian R-LPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang muatan dan sistematika pelaporannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan dalam penyusunan laporan ini demi mewujudkan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan prima.

Menyadari akan kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam Laporan ini, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami juga senantiasa menerima dengan tangan terbuka atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan ke depan. Akhirnya kami berharap semoga R-LPPD ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat di masa-masa yang akan datang. Sekian, Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. SYAHARUDDIN ALRIF, S.IP, M.M, Ph.D (Hon)

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja makro pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	LAJU KINERJA
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,81	75,49	0,91
2	Angka Kemiskinan	5,02	4,91	(2,19)
3	Angka Pengangguran	3,02	3,36	11,26
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,05	7,71	90,37
5	Pendapatan Per kapita	59,31	65,15	9,85
6	Ketimpangan Pendapatan	0,319	0,325	1.88

Sumber : BPS Kab. Sidrap Tahun 2025

a) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sesuai tabel diatas, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Sidenreng Rappang mencatat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 74,38. Meningkat di tahun 2024 menjadi 74,81 atau sebesar 0,578 persen. Dan di tahun 2025 ini kembali mengalami kenaikan yaitu 75,49 persen atau mengalami laju kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,91 persen. IPM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 ini berstatus tinggi. Kenaikan IPM ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, serta daya beli masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

b) Angka Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam tabel diatas, menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 5,14 persen. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 5,02 persen atau sebesar 2,335 persen dan pada tahun 2025 kembali turun ke angka 4,91 persen atau mengalami laju penurunan sebesar 2,19 persen dibandingkan tahun 2024.

c) Angka Pengangguran

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang, angka pengangguran Kabupaten Sidenreng Rappang dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2023 angka pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 3,29 persen dan pada tahun 2024 menjadi 3,02 persen atau turun sebesar 8,207 persen. Namun pada tahun 2025, angka pengangguran naik menjadi 3,36 persen atau mengalami laju kenaikan sebesar 11,26 persen dibandingkan tahun 2024.

d) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 3,28 persen. Pada tahun 2024 menjadi 4,05 persen atau mengalami kenaikan

yakni sebesar 23,467 persen dan pada tahun 2025 kenaikannya cukup *impresif* yaitu 7,71 persen atau mengalami laju kenaikan sebesar 90,37 persen dibandingkan tahun 2024. Capaian ini menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Sulawesi Selatan.

e) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang Pendapatan Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 pendapatan perkapita di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 55,51 Juta. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2024 yakni sebesar 59,31 Juta. Atau mengalami peningkatan sebesar 6,846 persen. Dan tahun 2025 kembali naik menjadi 65,15 juta atau mengalami laju kenaikan sebesar 9,85 persen dibandingkan tahun 2024.

f) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Sidenreng Rappang empat tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2022 tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,354. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,345 dan tahun 2024, gini ratio Kabupaten Sidenreng Rappang kembali turun menjadi 0,319. Pada Tahun 2025, tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Sidenreng Rappang kembali turun menjadi 0,325 persen atau mengalami laju penurunan sebesar 1,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

A. Capaian Kinerja Outcome

JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA 2024	CAPAIAN KINERJA 2025
PENDIDIKAN		
Pendidikan Anak Usia Dini	10.134	10.272
Pendidikan Dasar	47.463	47.992
Pendidikan Kesetaraan	304	2.230
KESEHATAN		
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.262	4.331
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.648	4.718
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.617	4.617
Pelayanan Kesehatan Balita	20.208	19.211
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	25.429	45.061
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	155.925	129.981
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	34.623	40.117
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	26.857	29.219
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.357	4.795
Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	761	881
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.779	6.379
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6.626	6.379

PEKERJAAN UMUM		
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	76.674	306.672
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah	73.404	297.652
PERUMAHAN RAKYAT		
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Tidak terjadi bencana	Tidak terjadi bencana
Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	0	0
TRANTIBUMLINMAS		
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	10
Pelayanan informasi Rawan Bencana	52.480	0
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	52.480	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korbanbencana	352	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	132	129
SOSIAL		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	10	17
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	10	12
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	25	22

Rehabilitasi Sosial Dasar tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	6	8
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	400	313

B. Realisasi Belanja

JENIS LAYANAN DASAR	REALISASI ANGGARAN
a. Pendidikan Anak Usia Dini	592.228.760,-
b. Pendidikan Dasar	292.505.999,-
c. Pendidikan Kesetaraan	5.581.654.000,-
d. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	595.770.157,-
e. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	35.789.844,-
f. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.014.024,-
g. Pelayanan Kesehatan Balita	44.062.000,-
h. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	597.715.168,-
i. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	20.105.133,-
j. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	43.759.600,-
k. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.274.000,-
l. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	11.100.950,-
m. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	397.188.050,-
n. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)	238.354.295,-
o. Pelayanan Kesehatan Orang	14.317.878,-

Dengan Resiko Terinfeksi HIV	
p. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	18.272.000,-
q. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.745.177.777,-
r. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah	105.475.700,-
s. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	0,-
t. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.317.088.500,-
u. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	52.481,-
v. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,-
w. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0,-
x. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	3.430.714.850,-
y. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	99.866.054,-
z. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	77.702.300,-

C. Permasalahan Yang dihadapi

URUSAN	PERMASALAHAN
a. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• APM SD dan SMP masih rendah, masih terdapat anak putus sekolah, belum maksimalnya tata kelola dana BOS, data Anak tidak sekolah yang belum akurat• Masih rendahnya minat masyarakat yang belum tamat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan.
b. Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Ibu hamil memeriksakan kehamilannya setelah umur 12 minggu• Tingginya kasus abortus dan persalinan preterm.• Ibu hamil tidak menetap dan berpindah alamat.• Adanya kasus hamil diluar nikah.• Banyaknya kasus abortus• Sasaran ibu hamil yang berpindah keluar wilayah• Adanya kasus KJDR / lahir mati• Adanya kasus Bayi Lahir Hidup yang tidak sempat di Kunjungan Neonatal sesuai standar kemudian meninggal• D/S Balita ke Posyandu belum mencapai target• Adanya balita yang tidak menetap dan pindah alamat• Kompetensi petugas pelayanan anak sekolah perlu ditingkatkan• Kurangnya Posbindu Kit• Kurangnya Kader Terlatih• Kompetensi petugas pelayanan lansia perlu ditingkatkan• Terbatasnya alat dan bahan yang dipakai dalam

	<p>pelayanan lansia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada buku kesehatan lansia • Kurangnya alat ukur tekanan darah • Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan • Kurangnya strip pemeriksaan DM • Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan • Kurangnya tenaga kesehatan terlatih • Kurangnya kepedulian keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap ODGJ • Pasien ODGJ tidak memiliki biaya dan jaminan kesehatan • Kurangnya dukungan lintas program lintas sektor dan masyarakat • Kurangnya dukungan LS (Lintas Sektor)
c. Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran sarana dan prasarana air bersih/minum terkendala dengan adanya Refocusing Dana Alokasi Khusus 2020 dari Kementerian. • Pada umumnya pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih cukup baik, hanya saja untuk pelaksanaan pekerjaan dengan Type pekerjaan Pengeboran dibutuhkan Penyedia Jasa yang memenuhi syarat sehingga peralatan dan metodologi pelaksanaan di lapangan dapat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Selain itu ditemukan juga kepemilikan lahan lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang bermasalah pada saat pelaksanaan sehingga cukup menghambat penyelesaian pekerjaan tepat waktu. • Minimnya pemahaman masyarakat terhadap

	<p>proses pelaksanaan konstruksi dilapangan sehingga sangat dibutuhkan pula koordinasi yang baik antara pihak OPD Teknis, BPKD dan Pemerintah Desa / Kelurahan sehingga proses pelaksanaan fisik dan keuangan dapat berjalan selaras.</p>
d. Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada hunian korban bencana yang masuk kategori rumah yang yang perlu mendapatkan pelayanan sesuai standar SPM • Tidak ada hunian masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah
e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Linmas	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya laporan/aduan dari masyarakat yang menjadi sasaran layanan SPM ketentraman dan ketertiban umum. • Kurangnya dukungan anggaran • Kurangnya dukungan personil • Adanya cuaca ekstrim yang timbul • Kesadaran masyarakat dalam menjaga alam perlu ditingkatkan • Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana perlu dimotivasi • Kesadaran masyarakat membuang sampah dan menebang perlu dimaksimalkan • Keterbatasan pada peralatan, sarana dan prasarana
f. Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya alokasi anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN Tahun 2024 • Minim anggaran yang dialokasikan sehingga penerima bantuan yang disentuh terlalu sedikit • Faktor lingkungan atau lokasi bencana yang sulit dijangkau akibat sulitnya akses ke lokasi bencana karena rusaknya akses jalan menuju

	ke lokasi bencana.
--	--------------------

3. Hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.7- 2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, nilai EPPD Kabupaten Sidenreng Rappang **2,9653** status **Sedang**. Untuk hasil EPPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 hingga saat ini belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk yang kesembilan kalinya berturut-turut.

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
1.263.923.128.000.00	1,277.958.262.887.01	14.035.134.887.01	101.11

Pada Tahun Anggaran 2025, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp.1,27 Trilyun lebih atau 101.11 persen dari target sebesar Rp.1,26 Trilyun lebih.

ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
1.307.661.088.000.00	1,261.054.440.289.00	(46.606.647.711.00)	96.43

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1,26 Trilyun lebih atau 96.43 persen dari anggaran sebesar Rp. 1,30 Trilyun lebih.

5. Realisasi Penerimaan Menurut Jenis Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran, dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.

a. Realisasi Penerimaan

Pendapatan Daerah terdiri atas penerimaan yang bersumber dari Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang capaiannya, sebagai berikut:

NO	REALISASI PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	Pendapatan Asli Daerah	229.734.125.000.00	237.431.844.449.00	7.697.719.449.00
2	Pendapatan Transfer	1.032.589.003.000.00	1.038.906.418.438.00	6.317.415.438.00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.600.000.000.00	1.620.000.000.00	20.000.000.00

b. Realisasi Pengeluaran

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1,26 Trilyun lebih atau 96.43 persen dari anggaran sebesar Rp. 1,30 Trilyun lebih. Adapun rincian belanja daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

NO	REALISASI PENGELUARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.	Belanja Operasi	1.027.542.950.000.00	1.003.804.373.884.00	(23.738.576.116.00)
2.	Belanja Modal	138.346.905.000.00	132.599.665.688.00	(5.747.239.312.00)
3.	Belanja Tak Terduga	2.150.000.000.00	1.698.609.292.00	(451.390.708.00)
4.	Transfer	139.621.233.000.00	122.951.791.425.00	(16.669.441.575.00)

c. Realisasi Pembiayaan

NO	REALISASI PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	46.012.960.133	46.012.960.133	100
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.275.000.133	2.274.086.498	100

6. Inovasi daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing suatu negara dan daerah. Berikut beberapa inovasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 :

- Inovasi WIROSABLENG (Puskesmas Empagae DinkesdaldukKB) (terbaik II)
- Inovasi PESAN TOBAT DARI SURGA (Puskesmas Lancirang DinkesdaldukKB) (terbaik II)
- Inovasi CEGAT DENGAN PEKA (RSUD Nene Mallomo DinkesdaldukKB) (terbaik II)
- Inovasi MBAH SIJAKA (RSUD Arifin Nu'mang) (terbaik I)
- Inovasi RUMAH LANGIT (Ruang Masyarakat Khusus Layanan Pendidikan Nonformal Gratis Terintegrasi) diikutkan dalam penilaian penghargaan Pembangunan daerah.